

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Tinjauan Pustaka	9
5.1. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	9
5.2. Penggelapan Pajak	10
5.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	12
5.3.1 Pertanggungjawaban Pidana	12
5.3.2 Korporasi	13

6.	Metode Penelitian.....	15
6.1.	Tipe Penelitian	15
6.2.	Pendekatan Penelitian	15
6.3.	Sumber Bahan Hukum.....	16
6.4.	Pengumpulan Bahan Hukum	18
6.5.	Analisis Bahan Hukum	18
7.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.	KARAKTERISTIK KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENGSELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN	
2.1.	Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	21
2.2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	33
2.3	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	38
BAB III.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENGSELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN	
3.1.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	43
3.2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung	54
3.3.	Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Pengselapan Di Bidang Perpajakan	58

3.4. Sanksi Pidana Untuk Korporasi Yang Melakukan Penggelapan Pajak ..	62
3.5 Pembahasan Kasus	67
3.5.1 Pembahasan Kasus PT Tiara Dewata Group	66
3.5.2 Pembahasan Kasus UD. Jaya Raya	69
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	75

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pajak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/ A/ JA/ 10/ 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

